

**STUDENTS' PERCEPTION TOWARDS THE DEMOCRATIC VALUES
OF PANCASILA ON PREVENTING RADICALISM
(Case study on Muhammadiyah Student Association of Universitas
Muhammadiyah Purwokerto and Jendral Soedirman University)**

Elly Hasan Sadeli dan Eko Priyanto
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto.
Email : ellyhasansadeli@ump.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi aktual dan faktual tentang persepsi mahasiswa pengurus dan anggota IMM Korkom UMP dan Soedirman terhadap demokrasi Pancasila dalam menangkal paham radikalisme. Proses penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini dilakukan di organisasi IMM Korkom UMP dan Soedirman, yang menjadi subjek penelitian adalah pengurus dan anggota IMM. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pengurus dan anggota IMM korkom UMP dan Soedirman belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep demokrasi Pancasila, namun dalam menjalankan organisasi para pengurus dan anggota sebenarnya telah melaksanakan benih-benih praktek demokrasi Pancasila dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, 2) Secara konkrit dalam mengantisipasi paham radikal, organisasi IMM sendiri tentu saja memperkuat dan menyesuaikan rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar tidak disisipkan paham tersebut. AD/ART sebagai pilar pergerakan organisasi harus menunjukkan dan mewakili ideologi Pancasila dan kemuhammadiyah sebagai ruh dan dasar perjuangan. Juga disepakati agar para pengurus dan anggota berkomitmen dalam menunjukkan aksi dan pemikirannya yang dilandasi oleh semangat demokrasi Pancasila dan tentu saja Muhammadiyah. Tanpa komitmen dan prinsip yang kuat, maka paham radikal akan mudah masuk ke dalam tubuh organisasi. 3) Setiap akan melaksanakan kegiatan, pengurus IMM diberikan ruang publik untuk berdiskusi melalui musyawarah. Inilah sebenarnya sebagai benih dari demokratisasi. Dinamika yang terjadi di tubuh IMM senantiasa dijadikan sebagai perbedaan dengan dasar *rahmatan lil 'alamin*. 4) Bahaya masuknya paham radikal, bagi IMM tidak ada sosialisasi yang khusus, namun senantiasa membangun dan membuka ruang diskusi rutin membahas pemahaman radikal. Oleh karena itu, pentingnya membangun pemahaman demokrasi Pancasila terhadap seluruh anggota juga dilakukan melalui proses dialogis dan implementatif.

Kata Kunci : Demokrasi Pancasila, Radikalisme

*Student's Perception Towards The Democratic Values of Pancasila on Preventing
Radicalism (Case Study on Muhammadiyah Student Association of Universitas
Muhammadiyah Purwokerto and Jendral Soedirman University | Elly Hasan Sadeli
dan Eko Priyanto*

Abstract

The main objective of this study is to investigate factual information regarding the perception of students who are enlisted as the member of Muhammadiyah Student Association (IMM) Coordinator Office of Universitas Muhammadiyah Purwokerto and Jendral Soedirman University toward the democracy of Pancasila against radicalism. The research uses qualitative approach with case study method. Technique of collecting data is done through observation, interview, documentation study and literature study. This study was conducted at IMM Korkom UMP and Soedirman. The subject of this study is the board and member of IMM. The result of the study shows that the board and members of IMM (UMP and Soedirman) has yet to possess the complete understanding on the concept of democracy of Pancasila. However in running the organization, basically the member of association has already implemented the value of the democracy of Pancasila on the program they plan and the implementation itself, 2) on the endeavor of radicalism prevention, The IMM itself for sure strengthen and adjust the draft of Articles of Association / Bylaws (AD / ART) to prevent radicalism infiltration. AD / ART as a pillar of the movement of the organization must show and represent the ideology of Pancasila and kemuhammadiyah as the spirit and the basis of the struggle. It is also agreed that the board and members are committed to show their actions and thoughts based on the spirit of the democracy of Pancasila and of course Muhammadiyah. Without strong commitments and principles, radicalism will easily enter into the body of the organization. Prior to carrying out activities, The IMM management is given a public space to discuss through

deliberation. This is actually the seed of democratization. The movement that occurs in the IMM is always treated as a diversity with the base of *rahmatan lil 'alamin*. 4) The threat of radicalism, For IMM there is no specific procedural regarding socialization in preventing radicalism, but it is considered to be necessary to always build and open the discussion regularly discussing radicalism. Therefore, the importance of building an understanding of The Democracy of Pancasila towards all members is also done through a dialogical and implementation process. **Keywords: The Democracy of Pancasila, Radicalism**

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen atau sering dikatakan sebagai sebuah negara yang majemuk. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang kurang lebih sebanyak 250 juta jiwa. Tentu saja ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala kekayaan yang ada di nusantara.

Akan tetapi, dengan keberagaman ini juga memiliki potensi yang dapat melahirkan suatu bentuk ancaman disintegrasi. Bahkan Akhir-akhir ini Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan yang mengancam kebhinekaan bangsa yakni munculnya praktek kekerasan yang mengatas namakan agama dari fundamentalisme

dan radikalisme, terutama dari oknum-oknum yang mengatasnamakan agama islam. Aksi demonstrasi yang anarkis, kasus penistaan agama, kejadian bom bunuh diri dan pembakaran tempat ibadah serta gerakan ISIS yang sampai sekarang masih terjadi. Peristiwa ini diindikasikan oleh banyak pihak akibat adanya radikalisme.

Menurut Saifudin (2011:18) mengungkapkan bahwa secara garis besar gerakan radikalisme disebabkan oleh faktor ideologi dan faktor non-ideologi seperti ekonomi, dendam, sakit hati, ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Faktor ideologi sangat sulit diberantas dalam jangka pendek dan memerlukan perencanaan yang matang karena berkaitan dengan keyakinan yang sudah dipegangi dan emosi keagamaan yang kuat. Faktor ini hanya bisa diberantas permanen melalui pintu masuk pendidikan (*soft treatment*) dengan cara melakukan deradikalisasi secara evolutif yang melibatkan semua elemen. Pendekatan keamanan (*security treatment*) hanya bisa dilakukan sementara untuk mencegah dampak serius yang ditimbulkan sesaat. Sementara faktor kedua lebih mudah untuk diatasi, suatu contoh radikalisme yang disebabkan

oleh faktor kemiskinan cara mengatasinya adalah dengan membuat mereka hidup lebih layak dan sejahtera. Faktor ideologi merupakan penyebab terjadinya perkembangan radikalisme di kalangan mahasiswa. Secara teoretis, orang yang sudah memiliki bekal pengetahuan setingkat mahasiswa apabila memegang keyakinan yang radikal pasti sudah melalui proses tukar pendapat yang cukup lama dan intens sehingga pada akhirnya mahasiswa tersebut dapat menerima paham radikal.

Praktik demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia, justru membuka ruang bagi paham-paham tertentu yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kemungkinan hal ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk menyuntikkan paham radikalisme yang sedang hangat terjadi saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi perlu dipahami lagi secara komprehensif, agar praktek demokrasi di Indonesia memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang ada. Kekhawatiran praktik demokrasi yang telah melenceng dari kaidah yang seharusnya, memang tidak dapat dihindari. Bahkan Presiden Jokowi

menilai praktik demokrasi di negara Indonesia sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan. Sehingga, praktik demokrasi dalam sistem politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan lainnya. Serta ajaran yang lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penyimpangan praktik demokrasi itu mengambil bentuk nyata seperti yang dapat dilihat akhir-akhir ini seperti politisasi SARA. (Jokowi: *Demokrasi Kita sudah Kebablasan*, <https://news.detik.com/berita/d-3428904/jokowi-demokrasi-kita-sudah-kebablasan>, diakses tanggal 20 Juni 2017).

Pendapat Presiden Jokowi di atas sangat mendasar terhadap praktik demokrasi saat ini, karena sebagian masyarakat awam hanya memahami bahwa demokrasi adalah kondisi dimana setiap yang akan dikerjakan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya tanpa melihat aturan konstitusional. Sehingga substansi nilai-nilai demokrasi sering diejawantahkan. Berkaitan dengan pandangan tersebut, Erawan (2011), yang menjabat sebagai direktur

eksekutif (*institute for peace and democracy*) atau lembaga perdamaian dan demokrasi, pada lokakarya demokrasi forum IV di Nusa Dua Bali, menjelaskan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia dinilai baru pada tingkat prosedural, hal ini dapat dilihat dari tersedianya berbagai institusi demokrasi seperti partai, parlemen, eksekutif yang berfungsi sesuai dengan aturan hukum yang ada. Akan tetapi, institusi yang ada belum mampu memenuhi keinginan dari rakyat seperti pemenuhan tingkat kesejahteraan, perlindungan terhadap hak minoritas dan terciptanya keadilan. Saat ini yang terjadi adalah para tokoh politik yang terpilih melalui proses demokrasi justru terperangkap dalam perangkap politik (semacam jebakan politik) yang membuat mereka yang menganggap bahwa politisi itu mengabdikan pada konstituen, dan konsep konstituen sangat disempitkan pada orang yang memberi suara. Selain itu, dengan mahalannya proses politik menyebabkan tokoh atau elit yang ingin mengabdikan pada negara tidak mampu ikut bersaing. Dengan mahalannya proses politik, semua itu pakai uang sangat besar. Itu membuat sempit sekali bagi warga negara yang akan mengabdikan

pada bangsa dan negara. Sehingga demokrasi yang ada sekarang baru berhenti pada melahirkan institusi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan proses perekrutan terhadap elit politik di Indonesia, agar dapat membawa kemajuan yang lebih baik bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Oleh karena itu, demokrasi perlu dipahami lebih komprehensif lagi, semisal di dalam proses pendidikan baik di persekolahan, di masyarakat, serta di media elektronik maupun surat kabar yang diberi kebebasan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Namun, tidaklah cukup untuk memahami apa substansi atau nilai-nilai pokok dari demokrasi tersebut, tanpa diimbangi dengan telaah atas makna dan nilai pokok demokrasi, terlebih memaksakan konsep nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan sosio-kultur masyarakat untuk membangun kompetensi kewarganegaraan yang demokratis. Oleh karena itu, pemahaman secara utuh dalam konteks kompetensi kewarganegaraan atas konsep dan hakikat serta nilai-nilai pokok demokrasi kiranya merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terbantahkan, lebih-

lebih untuk mewujudkan warga negara yang demokratis, warga negara yang partisipatif, dan bertanggung jawab.

Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa *ethos* demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Sebagaimana ditegaskan Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2):

“...each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must be fostered and nurtured by word and study and by the power of example. Democracy is not a “machine that would go of itself,” but must be consciously reproduced, one generation after another”.

Kutipan tersebut di atas menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah

“mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dari pendapat tersebut tergambar untuk membangun budaya demokrasi, diperlukan suatu pendidikan demokrasi yang dapat mengajarkan apa dan bagaimana demokrasi itu dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rumusan ini sesuai dengan rumusan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi salah satu dasar negara pada sila kelima pancasila, berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut. Salah satu elemen yang sangat penting adalah peran serta mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan melalui gerakan-gerakan yang bersifat preventif dan kritis terhadap perkembangan paham radikalisme.

Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi aktual dan faktual

tentang “persepsi mahasiswa terhadap demokrasi Pancasila dalam menangkal paham radikalisme. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa yang tergabung dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terhadap demokrasi Pancasila
2. Untuk mendeskripsikan realitas organisasi IMM dalam mengantisipasi masuknya paham radikalisme
3. Untuk mengungkap penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam struktur dan praktik organisasi IMM
4. Untuk menganalisis konstruksi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kegiatan organisasi IMM guna menangkal paham radikalisme.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell (1998:15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut:

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses

words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Stake (Lincoln dan Guba, 1985:341) bahwa metode ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Metode studi kasus lebih menitik beratkan pada suatu kasus, adapun kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam menangkal radikalisme. Kasus tersebut dibatasi dalam suatu ruang lingkup hubungan IMM Korkom UMP dan Soedirman. Penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan antar

personal, artinya selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan kontak atau berhubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data/informasi yang utama dalam penelitian naturalistik inkuiri, dengan mengamati kegiatan secara langsung yang dilakukan pengurus IMM korkom UMP dan Soedirman.

2. Wawancara

Lincoln dan Guba, (1985:268), mengartikan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perorangan, kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi, kepedulian, disamping itu dapat mengalami dunia pikiran dan perasaan responden.

Dengan menggunakan teknik wawancara data yang belum jelas berupa ucapan, pikiran, gagasan, perasaan dan tindakan dari pengurus IMM korkom UMP dan Soedirman dapat terungkap oleh peneliti secara

akurat. Untuk memperoleh keterangan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilaksanakan, maka dilakukan tanya jawab dengan pengurus IMM korkom UMP dan Soedirman sebagai sumber yang dapat dipercaya atau pihak-pihak terkait yang dapat memberikan masukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang langsung dilontarkan pada sumber dan diperoleh jawaban lebih lanjut

3. Studi Dokumentasi

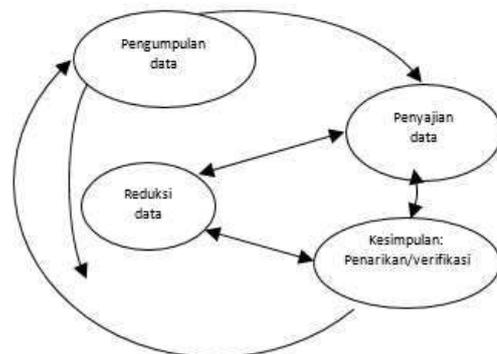
Untuk melengkapi data dalam rangka menganalisis masalah yang sedang diteliti, kita memerlukan informasi dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Adapun dokumen dalam penelitian ini seperti struktur pengurus IMM korkom UMP dan Soedirman, visi dan misi, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Studi Literatur

Studi literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Studi literatur dilakukan melalui mempelajari buku yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti, jurnal dan atau artikel-artikel yang relevan, surat kabar baik cetak maupun elektronik.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Nasution (1988:129) mengemukakan bahwa: tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi semua penelitian, salah satu cara yang dapat dianjurkan mengikuti langkah-langkah berikut : 1) reduksi data, 2) display data, 3) pengambilan kesimpulan dan verifikasi.



Bagan 1. Komponen-komponen Analisis Data (Miles dan Huberman, 1992:20)

Bagan di atas dapat dijelaskan bahwa tiga jenis kegiatan utama pengumpulan data (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) merupakan proses siklus interaktif.

Hasil dan Pembahasan

Pengurus dan anggota IMM korkom UMP dan Soedirman belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep demokrasi Pancasila. Pemahaman mahasiswa yang tergabung dalam IMM Korkom UMP dan Soedirman masih cukup sederhana dalam memahami demokrasi Pancasila, hanya sebatas demokrasi biasa, yang dalam pengertian demokrasi sendiri itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan belum mengimplikasikan ke dalam pemahaman yang utuh tentang demokrasi Pancasila. Maka tidak heran, Hatta (1953:39-41) menggambarkan bahwa demokrasi telah berurat akar dalam pergaulan hidup kita. Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Dikatakan bahwa desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. Itulah yang disebut "demokrasi asli". Demokrasi asli itu memiliki 5 unsur atau anasir yaitu; rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan

hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Saat itu, Hatta lebih suka menggunakan istilah kerakyatan, untuk membedakannya dengan demokrasi Barat yang cenderung individualistik meskipun pemahaman pengurus IMM terhadap demokrasi Pancasila masih sederhana namun telah mempraktekannya dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan IMM. Akan tetapi kondisi tersebut tidaklah ideal, karena setiap perilaku harus didasarkan pada pemahaman yang utuh.

Oleh karena itu, demokrasi Pancasila perlu dipahami lebih komprehensif lagi, semisal di dalam proses pendidikan baik di kelas, di masyarakat, serta di media elektronik maupun surat kabar yang diberi kebebasan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat. Namun, tidaklah cukup untuk memahami apa substansi atau nilai-nilai pokok dari demokrasi tersebut, tanpa diimbangi dengan telaah atas makna dan nilai pokok demokrasi, terlebih memaksakan konsep nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan ideologi untuk kehidupan yang demokratis. Oleh karena itu, pemahaman secara utuh atas konsep

dan hakikat serta nilai-nilai pokok demokrasi kiranya merupakan suatu keharusan yang tidak dapat terbantahkan, lebih-lebih untuk mewujudkan warga negara yang demokratis, warga negara yang partisipatif, dan bertanggung jawab.

Sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa *ethos* demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Sebagaimana ditegaskan Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2):

“...each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must be fostered and nurtured by word and study and by the power of example. Democracy is not a “machine that would go of itself,” but must be consciously reproduced, one generation after another”.

Kutipan tersebut di atas menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan

keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Meskipun pada hakikatnya, setiap akan melaksanakan kegiatan, seluruh pengurus dan anggota IMM senantiasa melakukan komunikasi yang transparan dan terencana dengan baik melalui proses musyawarah, namun karena pemahaman yang masih sederhana terhadap konsep demokrasi Pancasila, akhirnya mereka mendikotomikan antara kegiatan yang biasa dikerjakan dengan kurangnya pemahaman terhadap konsep demokrasi tersebut. Padahal proses musyawarah yang dikerjakan merupakan bagian dari demokratisasi.

1. Memperkuat dan menyesuaikan rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Masuknya paham radikal ke dalam organisasi kemahasiswaan mengakibatkan beberapa organisasi semakin menguatkan ideologinya dalam rangka mengantisipasi paham tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan pengurus IMM korkom

UMP dan Soedirman menjabarkan bahwa organisasi IMM sendiri secara Konkrit dalam mengantisipasi paham radikal tentu saja memperkuat dan menyesuaikan rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar tidak disisipkan paham tersebut. AD/ART sebagai pilar pergerakan organisasi harus menunjukkan dan mewakili ideologi Pancasila dan kemuhammadiyah sebagai ruh dan dasar perjuangan.

Selain memperkuat AD/ART, para pengurus juga sepakat agar seluruh anggota berkomitmen dalam menunjukkan aksi dan pemikirannya yang dilandasi oleh ideologi negara dan tentu saja Muhammadiyah. Tanpa komitmen yang kuat, maka paham radikal akan mudah masuk ke dalam organisasi, karena tidak didukung oleh prinsip yang jelas.

Setiap kegiatan di IMM, seluruh anggota diwajibkan mematuhi aturan yang telah disepakati, berdasarkan hasil temuan, seluruh anggota IMM dalam berpakaian untuk tidak menunjukkan sikap eksklusif, misalnya pengurus sedang meninjau kembali bagi anggota perempuan yang menggunakan cadar, karena mereka memahami bahwa cadar tidak

sepenuhnya mewakili anjuran dari kampus dan Muhammadiyah. Mereka menganggap cadar sebagai sebagai ajaran ekstrim kanan.

Dalam lingkup keagamaan, menurut A.Rubaidi(2007:33) radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Pada hakikatnya, organisasi IMM tidak hanya bergerak dalam kajian agama saja, tetapi juga dalam isu-isu lainnya seperti politik, ekonomi, seni dan budaya. Maka harapannya bagi seluruh anggota IMM tidak hanya sekedar paham agama, tetapi bagaimana mengimplementasikan ajaran dan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata bagi kemaslahatan umat di dunia. Sehingga ideologi lain yang bertentangan dapat diminimalisir dengan pemahaman yang kuat dan utuh.

2. Musyawarah sebagai ruang publik dalam menerapkan Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila.

Bangsa dan negara Indonesia memiliki keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan, tentu ini merupakan tantangan sekaligus anugerah dari

Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, pendiri bangsa ini sangat peka melihat perbedaan, namun juga tidak meruncingkan perbedaan tersebut sebagai benih kebencian. Akan tetapi justru perbedaan itulah yang menjadikan bangsa dan negara ini tidak tercerai berai. Pondasi yang kuat adalah sebagai modal utama dalam membangun, maka dengan kekuatan Pancasila negara ini mampu berdiri tegak meski dalam perbedaan.

Adanya kebersamaan dalam membangun cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi secara formal konstitusional. Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi, yakni "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" (alinea ke-2); "...maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya" (alinea ke-3); "...maka disusunlah Kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan

berdasar kepadadst...kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, .."(alinea ke-4),. Kemudian dalam *Mukadimah Konstitusi RIS*, "Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan ...dst...kerakyatan..." (alinea ke-3); "Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna". Selanjutnya dalam *Mukadimah UUDS RI 1950*, "...dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ...dst... yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". (alinea ke-2); "...yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ..dst...kerakyatan...dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna" (alinea 4). Pada tataran ideal semua konstitusi tersebut sungguh-sungguh menganut paham demokrasi. Hal ini mengandung arti bahwa paham demokrasi konstitusional sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai saat ini merupakan landasan dan orientasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Secara

instrumental dalam ketiga konstitusi tersebut juga telah digariskan adanya sejumlah perangkat demokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia untuk mengisi lembaga perwakilan rakyat; partisipasi politik rakyat melalui partai politik; kepemimpinan nasional dengan sistem presidentil atau parlementer, perlindungan terhadap hak azasi manusia; sistem desentralisasi dalam wadah negara kesatuan (UUD45 dan UUDS 50) atau sistem negara federal (Konstitusi RIS 49); pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; orientasi pada keadilan dan kesejahteraan rakyat; dan demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, IMM sebagai bagian dari perjuangan untuk membangun negeri, senantiasa menjalankan nilai-nilai dasar negara dalam setiap langkah organisasi. Saat ini, IMM telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Visi IMM adalah mencetak calon pemimpin yang cerdas, inovatif dan islami dalam segala aspek sehingga dapat membentuk kader yang memiliki semangat juang yang tinggi.

Untuk membangun ideologi tentu saja tidak boleh hanya tiap anggota,

tetapi diawali dari kekuatan struktur organisasi IMM sendiri. Pandangan ketua IMM Korkom UMP semakin menekankan bahwa organisasi ini memberikan dampak yang positif yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Bahkan setiap akan melaksanakan kegiatan, pengurus IMM diberikan ruang publik untuk berdiskusi melalui musyawarah. Inilah sebenarnya sebagai benih dari demokratisasi. Dinamika yang terjadi di tubuh IMM senantiasa dijadikan sebagai warna-warni yang indah, karena dengan dinamika tersebut seluruh pengurus dan anggota IMM semakin mengalami pendewasaan dalam berorganisasi.

Azra, (2002:8-9) memberikan pesan bahwa meningkatnya kecenderungan penggunaan cara-cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik Indonesia belakangan ini, sebagian besarnya bersumber dari konflik di antara elit politik yang tidak kunjung terselesaikan sampai saat ini. Jika salah satu esensi demokrasi dan politik adalah "*art of compromise*" dan respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justru menyaksikan kian meningkatnya sikap "*pokoknya*" pada kalangan elit politik dan massa. Lebih celaka lagi sikap-sikap seperti itu

kemudian diberi legitimasi keagamaan dan teologis oleh kalangan ulama, sehingga potensi kekerasan yang mengancam demokrasi semakin menguat lagi. Menciptakan kultur demokrasi bukan saja tidak mudah, melainkan juga membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Bagi bangsa Indonesia yang baru memulai demokrasi dalam usia *seumur jagung* memang menjadi persoalan tersendiri terutama berkaitan dengan kesiapan masyarakat menjalankan praktek demokrasi.

Peluang menerapkan demokrasi Pancasila merupakan keharusan, namun juga bukan kesulitan bagi organisasi ini, karena setiap menjalankan roda organisasi, iklim demokrasi senantiasa hadir dan memberi keindahan atas perbedaan gagasan-gagasan dalam rangka memperkuat prinsip semangat IMM. Prinsip-prinsip tersebut tentu saja didasarkan pada Pancasila. Berdasarkan temuan di lapangan, seluruh pengurus dan anggota berupaya menerapkan demokrasi Pancasila, baik dalam aspek transendental maupun aspek kemanusiaan, mereka menganggap bahwa agama yang dianut dan tidak

mengajarkan melalui proses intimidasi merupakan kondisi yang telah dicontohkan oleh pemimpin yang mulia Nabi Muhammad SAW, hal ini juga merupakan bagian dari ajaran Pancasila.

Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia ialah demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kartaprawira (2002:1991) menyatakan bahwa: "Praktik-praktik mekanisme demokrasi Pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi sistem politik Indonesia". Demokrasi Pancasila ini termasuk demokrasi yang konstitusional, sebagaimana dikemukakan oleh Budiardjo (1996:51), bahwa: "Beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945".

Jadi dalam menerapkan demokrasi Pancasila, adalah hal yang paling fundamental baik dalam struktur maupun dalam praktik menjalankan roda organisasi IMM yang didukung oleh nilai-nilai religiusitas yang matang

dari seluruh anggota dan sesuai dengan napas dan ruh perjuangan Muhammadiyah.

Konstruksi Nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam Kegiatan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah guna Menangkal Paham Radikalisme

Merebaknya paham yang menggerogoti nilai-nilai dasar Pancasila, semakin mengkhawatirkan akan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tentu diperlukan penguatan kembali akan pentingnya merawat Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elemen bangsa bertanggung jawab atas prinsip yang telah diyakini selama ini sebagai sumbangsih pemikiran pendiri bangsa. Salah satu elemen yang punya peran penting sebagai generasi muda, adalah mahasiswa yang dengan gagasan dan keberaniannya sebagai ujung tombak kemajuan bangsa dan negara.

IMM sebagai wadah yang menampung gagasan dan ketajaman berpikir mahasiswa, tentu memiliki daya tawar yang kuat dalam membangun prinsip kemajuan bangsa dan negara.

Termasuk dalam membangun nilai dasar demokrasi Pancasila.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, dalam organisasi IMM, konstruksi nilai-nilai demokrasi Pancasila untuk menangkal paham radikalisme dilakukan dengan tetap mengacu terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut, dengan secara konsisten menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berorganisasi maupun kehidupan sehari-hari.

Sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam, Indonesia memiliki sistem yang sebenarnya menunjukkan bahwa lebih dekat dengan pandangan Huntington dan temuan Casanova, hal ini pula kemudian berkaitan dengan pandangan Sanusi (2006:193-205), yang mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal dengan "*The Ten Pilars of Indonesian Constitutional Democracy*" berdasarkan filsafat bangsa Pancasila dan Konstitusi Negara RI UUD NRI 1945 yaitu:

1. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Para pemeran politik dan pemimpin negara dan semua

warganegara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ia dituntut agar mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

a. Demokrasi yang Menjunjung Hak Asasi Manusia.

Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

b. Demokrasi yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat.

Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan melalui sistem perwakilan. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periodik.

c. Demokrasi yang didukung kecerdasan.

Warga negara yang cerdas dan terdidik secara politik merupakan syarat mutlak Untuk mewujudkan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga

negara kesadaran hak dan kewajibannya.

a. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan

Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. Dan memberikan kesempatan kepada Lembaga lain untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban jalannya pemerintahan.

b. Demokrasi yang menerapkan konsep Negara Hukum.

Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. Tanpa hukum kebebasan akan mengarah perbuatan yang anarkis. Pada akhirnya perbuatan itu meninggalkan nilai-nilai demokrasi.

Untuk mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum tidak dapat lepas dari perlindungan konstitusional, badan peradilan yang bebas, kebebasan berpendapat, berserikat, dan kesadaran kewarganegaraan.

a. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah.

Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dilaksanakan otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab mengindikasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. Sebagai wujud prinsip demokrasi kekuasaan negara tidak dipusatkan pemerintah pusat saja namun sebagian diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

b. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi bukan hanya politik saja melainkan juga demokrasi sosial dan ekonomi. Demokrasi sosial artinya demokrasi yang ditemukan dalam hubungan antar warga masyarakat dan atau warga negara. Juga harus dilandasi oleh penghormatan terhadap kemerdekaan, persamaan dan solidaritas antar manusia.

c. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan

prinsip ekonomi. Perekonomian harus dijaga dari persaingan bebas tanpa batas melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga mengambil peran yang cukup dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.

Sistem pengadilan yang merdeka memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Pengadilan yang merdeka dan otonom tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, namun hakim wajib mempertimbangkan keadilan yang berkembang di masyarakat.

Namun, tidak semua harapan dapat diraih dengan mudah, maka untuk mengantisipasi masuknya paham radikal, seluruh pengurus dan anggota dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan pentingnya merawat ideologi. Untuk mengantisipasi masuknya paham radikal, dilakukan pendekatan secara personal agar kemudian dapat mencegah paham tersebut dan dilakukan secara dialogis sehingga terjadi perdebatan yang sehat dengan tetap dilandasi oleh semangat belajar dan tidak untuk saling

menjatuhkan. Sebagaimana pandangan Sartono Kartodirdjo (1985:38) yang menjelaskan bahwa radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Radikalisme sering dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan.

Namun ketika paham radikal sudah mulai menggerogoti anggota, tiap pengurus memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman sesuai nilai-nilai demokrasi Pancasila, misalnya melalui musyawarah, yang paling penting tidak langsung dihukum tetapi adanya sebuah pendekatan secara Individu terlebih dahulu. Proses dialogis ketika adanya perbedaan pendapat, pertama dilakukan atau diberikan penguatan antar kedua perbedaan pendapat tersebut kemudian langsung kita bawa ke sistem musyawarah mufakat bersama teman-teman tidak sampai terjadi adu mulut yang berlebihan dan nantinya akan menimbulkan konflik tersendiri. Bahaya masuknya paham radikal, bagi IMM

tidak ada sosialisasi yang khusus, namun senantiasa membangun dan membuka ruang diskusi rutin membahas pemahaman radikal. Dalam lingkup keagamaan, menurut A.Rubaidi(2007:33) radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Sejalan dengan pandangan Rubaidi, menurut Hasani dan Naipospos (2010:19) radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan radikal bila dilihat dari pemahaman agama, dan yang kami maksud dalam tesis ini adalah agama Islam, adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap damai dan mencari kedamaian. Islam

tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.

Oleh karena itu, pentingnya membangun pemahaman demokrasi Pancasila terhadap seluruh anggota juga dilakukan melalui proses pada saat pengambilan keputusan, yang senantiasa dilakukan secara musyawarah dan mufakat, namun jika tidak menemukan benang merah bersama, baru akan dilakukan pemungutan suara (*Votting*). Memberikan pemahamannya dilakukan secara diskusi rutin yang dilakukan IMM. Disamping itu, untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan nasionalisme, setiap akan memulai kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars IMM dan Mars Muhammadiyah.

Simpulan

Pengurus dan anggota IMM korkom UMP dan Soedirman belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep demokrasi Pancasila, namun dalam menjalankan organisasi para pengurus dan anggota sebenarnya telah melaksanakan benih-benih praktek demokrasi Pancasila

dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

1. Secara konkrit dalam mengantisipasi paham radikal, organisasi IMM sendiri tentu saja memperkuat dan menyesuaikan rancangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar tidak disisipkan paham tersebut. AD/ART sebagai pilar pergerakan organisasi harus menunjukkan dan mewakili ideologi Pancasila dan kemuhammadiyah sebagai ruh dan dasar perjuangan. Juga disepakati agar para pengurus dan anggota berkomitmen dalam menunjukkan aksi dan pemikirannya yang dilandasi oleh semangat demokrasi Pancasila dan tentu saja Muhammadiyah. Tanpa komitmen dan prinsip yang kuat, maka paham radikal akan mudah masuk ke dalam tubuh organisasi.
2. Setiap akan melaksanakan kegiatan, pengurus IMM diberikan ruang publik untuk berdiskusi melalui musyawarah. Inilah sebenarnya sebagai benih dari demokratisasi. Dinamika yang terjadi di tubuh IMM senantiasa dijadikan sebagai perbedaan dengan dasar *rahmatan lil 'alamin*.

3. Bahaya masuknya paham radikal, bagi IMM tidak ada sosialisasi yang khusus, namun senantiasa membangun dan membuka ruang diskusi rutin membahas pemahaman radikal. Oleh karena itu, pentingnya membangun pemahaman demokrasi Pancasila terhadap seluruh anggota juga dilakukan melalui proses dialogis dan implementatif.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulisan artikel ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada redaksi Jurnal Dimensia yang telah menerbitkan tulisan ini.

Daftar Pustaka

- A.Rubaidi. 2007. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Branson, M.S. 1998. *The Role of Civic Education*, A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from the Communitarian Network.
- Cresswell, J.W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: SAGE Publications
- _____. 1998. *Qualitative Inquiry. Choosing among five tradition* : Sage Publications
- Badudu, J. S. & Zaih, S. M. 2001. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Budiardjo, M. 1996. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia Utama
- Daryanto. 1998. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka
- Erawan, I Ketut Putra. 2011. *Implementasi Demokrasi di Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/amp/101793.html> diakses tanggal 20 Juni 2017
- Hatta, Mohammad.1953. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Hornby, A.S. 2000. *Oxford Advanced Dictionary of current English*. UK: Oxford university press
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta: Pustaka MasyarakatSetara
- Irwan Masduqi. 2012. *Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam, No 2 Vol 1
- Jokowi. 2017. *Demokrasi Kita sudah Kebablasan*. <https://news.detik.com/berita/d-3428904/jokowi->

Student's Perception Towards The Democratic Values of Pancasila on Preventing Radicalism (Case Study on Muhammadiyah Student Association of Universitas Muhammadiyah Purwokerto and Jendral Soedirman University | Elly Hasan Sadeli dan Eko Priyanto

- demokrasi-kita-sudah-kebablasan, diakses tanggal 20 Juni 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Miles, M.B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nuhrison M. Nuh. 2009. *Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/ Gerakan Islam Radikal diIndonesia*. HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol VIII Juli-September 2009
- Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saifuddin. 2011. *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa (Sebuah Metamorfosa Baru)*. Jurnal Analisa Semarang : Balai Penelit. & Pengemb Agama. Volume XI, Nomor 1, Juni 2011
- Salim, P. & Salim, Y. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*. Jakarta : Modern english press.
- Sanusi, Achmad. 2006. "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam *Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Sartono Kartodirdjo. 1985. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan
- Somadikarta, S. 1996. *Buku informasi universitas Indonesia*. Depok : UI Press.